

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2023, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sarkawi, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Mataram: Pustaka Bangsa, Cetakan Ke 2
- Suharnoko, 2015, *Hukum Penerimaan Bukan Pajak: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi, E , 2017, *Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dalam Hukum Tata Ruang Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Zainal Asikin. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Makassar: Kencana

Jurnal

- Abrar Saleng, 2004, *Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 11(25), hlm 149-150
- Alifia Nurhikmawati, 2022, *Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submission Untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Semarang*, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta.
- Arrum, Da 2019, 'Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia', Jurisdiction, Vol. 2, No. 5
- Aprita And Nurhalimah "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia" Jurnal Ius Constituendum (2022)
- Assegaf, Mif, Juliani H, & Sa'adah N 2019, 'Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Jawa Tengah', Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 2.

- Bahmid "Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan" Jurnal Suara Pengabdian 45 (2023) Doi:10.56444/Pengabdian45.V2i3.949
- Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal Tapis, Vol. 9, No. 2, Juli – Desember.
- Dinarjito "Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Study Kasus Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" Jurnal Manajemen Keuangan Publik (2017) Doi:10.31092/Jmkp.V1i1.88.
- Erni dan Febri Jaya, 2022, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 6 No. 2, Hlm. 252-253.
- Gunawann "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet" Blantika Multidisciplinary Journal (2023) Doi:10.57096/Blantika.V2i2.
- Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm.514-515.
- Julyano And Sulistyawan "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" Crepido (2019)
- Mualifah Et Al. "Kekuatan Hukum Surat Pemilikan Sementara Sebagai Alat Bukti Dalam Pemberian/Penyerahan Hak Atas Tanah" Jurnal Risalah Kenotariatan (2022) Doi:10.29303/Risalahkenotariatan.V3i1.63.
- Mujiburohman "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)" Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan (2018) Doi:10.31292/Jb.V4i1.217.
- Putra "Jaminan Hukum Terkait Pencatatan Sertifikat Kepemilikan Tanah" (2022) Doi:10.61715/Jlexlectio.V1i1.16.

- Rachmawati *"Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah"* Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia (2021) Doi:10.36418/Syntax-Literate.V6i6.3038.
- Rahma Julianti, 2024, Materi *"Overview Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Disampaikan Dalam Konsultasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berbasis Risiko"*.
- Saputri *"Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan"* Pamulang Law Review (2020) Doi:10.32493/Palrev.V2i1.5340.
- Simanjutak, Ab, 2022, *Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kota Madiun*. Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta.
- Subuh, D, Harsono, D, & Ismail 2019, *'Kajian Penerapan Sistem Informasi Online Single Submission Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik'*, Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains (Sainteks) 2019.
- Sulastri Et Al. *"Pendampingan Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Di Serang"* E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (2022) Doi:10.26877/E-Dimas.V13i2.6676
- Solechan, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law And Governance Journal, Vol. 2 No. 3.
- Supratman Et Al. *"Penyuluhan Hukum Pentingnya Penyadaran Masyarakat Terkait Pendaftaran Dan Sertifikasi Pertanahan"* Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal (2023) Doi:10.58406/Jpml.V5i2.1062.
- Sutaryono & Nurrokhman, A 2020, *Penelitian Implementasi Penertiban Pemanfaatan Ruang, Pusat Pengembangan Dan Standarisasi*

*Kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Kementerian
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kab. Bogor.*

Tomo, 2019. *Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah*, (Tangerang Selatan: Indocamp, Hlm. 2-3.

Wardhana "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia" (2023) Doi:10.20884/1.Slr.2023.5.1.3495.

Waluyo "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma (2022) Doi:10.51921/Chk.V24i1.186

Victorianus M. H, 2015, *Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, hal.366.

Internet

Merdeka.com, "Nawacita adalah 9 Agenda Prioritas Pemerintah Jokowi-JK, Ini Penjelasannya", <https://www.merdeka.com/jatim/nawacita-adalah-9-agenda-prioritas-pemerintah-jokowi-jk-ini-penjelasannya-klm.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 20.09 WITA.

OSS INDONESIA,2020, "Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat", YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=EdpPi2idlnw&list=PLenijEUVo7ztUwKKq-yFbu4DN5dDHuzK9>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Pertimbangan Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 6/Juknis-Pf.01/Viii/2023 Tanggal : 3 Agustus 2023.

Wawancara

Dhafina Almas S,T., M.Pwk, Koordinator Penatagunaan Tanah, Kantor ATR/BPN Gowa. Rabu, 25 Juni 2025.

LAMPIRAN

